

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan bagian yang inhern dengan kehidupan. Pemahaman seperti ini, mungkin terkesan dipaksakan, tetapi jika mencoba merunut alur dan proses kehidupan manusia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan telah mawarnai jalan panjang kehidupan manusia dari awal hingga akhir. Pendidikan menjadi pengawal sejati dan menjadi kebutuhan asasi manusia. Pendidikan adalah pengawal sejati dan menjadi kebutuhan asasi manusia. V.R. Taneja, mengutip pernyataan Proopert Lodge, bahwa *life is education and education is life* berarti bahwa membicarakan manusia akan selalu bersamaan dengan pendidikan, dan demikian sebaliknya (Taneja, 2005).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ayat 1 berbunyi; pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajardan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Di dalam al-Qur'an semangat pendidikan jelas tertuang di ayat yang pertama turun kepada Rasulullah saw, yaitu perintah "Iqra". Suatu perintah yang menegaskan arti penting membaca. Nasir Baki dalam menjelaskan kata "iqra" sebagai sinyalemen, bahwa Islam dibangkitkan dengan cara mengajak kepada manusia untuk berpikir. Sinyalemen tersebut dapat dimaknai sebagai titik point urgensi pendidikan bagi setiap insan, karena melatih berpikir adalah bagian dari tugas pendidikan. Arti penting pendidikan, menempatkannya pada strata tertinggi kebutuhan manusia. Karena itu, pendidikan menjadi barometer kemajuan dan peradaban. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat pendidikan bangsa tersebut. Tidaklah mengherankan jika kemudian negara mengatur dan menjadikan pendidikan sebagai salah satu persoalan penting yang harus dibenahi dengan sebaik-baiknya.

Nelson Mandela dalam pengantar buku yang ditulis oleh Klaus Dieter Bieter, menyebut pendidikan sebagai kekuatan dahsyat yang membangun setiap Insan, dan seluruh negara di dunia menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak asasi. Demikian halnya dengan Indonesia, pendidikan merupakan satu bidang yang menjadi tanggung jawab Negara. Pembukaan UUD 1945 jelas mengamanatkan untuk “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Amanat tersebut secara hirarkis dituangkan ke dalam berbagai Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pendidikan. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dari definisi di atas, terlihat bahwa usaha pendidikan berupaya mengarahkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal agar terwujud suatu kepribadian yang paripurna pada dirinya. Harapan terhadap dunia pendidikan sangat besar untuk membawa peserta didik ke arah kualitas hidup yang sebaik-baiknya. (Yusuf, 2018:10).

Kurikulum adalah dasar pijakan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, pendidikan di Indonesia telah mengalami pergantian kurikulum. Pergantian kurikulum ini bukan berarti tanpa maksud melainkan bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu bukan tanpa alasan dan landasan yang jelas, sebab perubahan tersebut adalah keinginan untuk terus memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan. (Qomariyah, 2014:22).

Istilah “Kurikulum” memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dewasa

ini. Tafsiran-tafsiran tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan titik berat inti dan pandangan dari pakar yang bersangkutan. Istilah kurikulum berasal dari bahasa latin, yakni "*Curriculae*", artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelajari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dengan menempuh suatu kurikulum, siswa dapat memperoleh ijazah. Dalam hal ini, ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti, bahwa siswa telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran, sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara satu tempat ketempat lainnya dan akhirnya mencapai finish. Dengan kata lain, suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu (Aly, 2004).

Kurikulum juga merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (Undang-Undang No.20 TH. 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi. (Pasal 1 Butir 6 Kemendiknas No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa). Selain itu bila dilihat dalam proses belajar, Kurikulum merupakan serangkaian mata ajar dan pengalaman belajar yang mempunyai tujuan tertentu, yang diajarkan dengan cara tertentu dan kemudian dilakukan evaluasi. (Badan Standardisasi Nasional SIN 19-7057-2004 tentang Kurikulum Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Dokter Perusahaan). Dari berbagai macam pengertian kurikulum di atas kita dapat menarik garis besar pengertian kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (Tahihoran, 2017:3). (<https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/Permendikbud%20Nomor%2035%20Tahun%202018.pdf> , diakses pada 7 November 2024 pukul 12.30 WIB).

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, pengertian kurikulum merdeka belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Di sini, para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya. Kurikulum atau program merdeka belajar ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim sebagai bentuk dari tindak evaluasi perbaikan kurikulum 2013. (<https://www.aminpublicize.com/tulisan/detail/perangkat-ajar-kurikulum-merdeka> , diakses pada 6 Februari 2025 pukul 23.15 WIB).

Merdeka belajar merupakan kebijakan yang dirancang pemerintah untuk membuat lompatan besar dalam aspek kualitas pendidikan agar menghasilkan siswa dan lulusan yang unggul dalam menghadapi tantangan masa depan yang kompleks (Suyanto, 2020). Inti merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir bagi siswa dan guru. Merdeka belajar mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka di mana guru dan siswa dapat secara leluasa dan menyenangkan mengeksplorasi pengetahuan, sikap dan keterampilan dari lingkungan. Merdeka belajar dapat mendorong siswa belajar dan mengembangkan dirinya, membentuk sikap peduli terhadap lingkungan di mana siswa belajar, mendorong kepercayaan diri dan keterampilan siswa serta mudah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat (Ainia, 2020) (<https://bit.ly/xyz123>, diakses pada 7 November 2024 pukul 17.55 WIB). Karena itu keberadaan merdeka belajar sangat relevan dengan kebutuhan siswa dan tuntutan pendidikan abad 21. Karena esensi merdeka belajar adalah meletsakan pendidikan yang memerdekakan dan otonom baik guru maupun sekolah untuk menginterpretasi kompetensi dasar dalam kurikulum menjadi penilaian guru.

Implementasi kebijakan merdeka belajar mendorong peran guru baik dalam pengembangan kurikulum maupun dalam proses pembelajaran. Selain sebagai salah satu sumber belajar, dalam merdeka belajar guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang didukung oleh kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. dengan kompetensi-kompetensi tersebut guru dapat mewujudkan pelaksanaan dan tujuan implementasi kebijakan merdeka belajar (Pendi, 2020). Salah satu masalah yang timbul yang sekaligus mendorong munculnya kebijakan merdeka belajar adalah kesibukan guru yang terjebak dalam administrasi pembelajaran sehingga guru menjadi tidak optimal dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Iklim pendidikan di Indonesia menerima bahwa salah satu tugas guru adalah menyiapkan dan menyusun administrasi pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesibukan mengurus administrasi pembelajaran merupakan bagian dari proses pembelajaran. Hal ini dinyatakan Houtman (2020) bahwa guru dan sekolah terjebak dalam cara dan tujuan dimana menjadikan administrasi pendidikan menjadi kesibukan utama untuk tidak menyalahi ketentuan-ketentuan birokrasi, akreditasi, nilai dan ujian. Guru dan sekolah justru menjadikan administrasi pendidikan sebagai tujuan dan prioritas kegiatan Pendidikan. (<https://www.journal.mahesacenter.org/index.php/ppd/article/download/202/73>, diakses pada 7 November 2024 pukul 20.30 WIB).

Ditinjau dari struktur kurikulum merdeka ditemukan penerapan yang berbeda pada mata pelajaran tertentu, seperti Informatika, Seni yang terintegrasi dengan Prakarya serta pelajaran muatan lokal sesuai dengan potensi peserta didik dan terintegrasi dengan tema Proyek Penguatan Profil Pacasila. Penerapan kurikulum merdeka belajar ini merupakan sebuah terobosan untuk Pendidikan Indonesia, dimana penerapannya mendorong siswa untuk bias maksimal dalam proses pembelajaran. Namun dari pengamatan yang peneliti lakukan saat melakukan program pengenalan lingkungan persekolahan, implementasi dari kurikulum merdeka ini belum bisa dilaksanakan secara maksimal.



Yusuf (2011: 124) berpendapat bahwa perilaku sosial adalah menggambarkan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya secara efektif. Bentuk-bentuk perilaku sosial adalah berselisih atau bertengkar, menggoda, persaingan, kerja sama, tingkah laku berkuasa, dan simpati. Selanjutnya Ahmad (2009: 137), mengatakan perilaku sosial adalah kegiatan yang berhubungan dengan orang lain, kegiatan yang berkaitan dengan pihak lain yang memerlukan sosialisasi dalam hal bertingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain, belajar memainkan peran sosial serta upaya mengembangkan sikap sosial yang layak diterima oleh orang lain. (<https://journal.uir.ac.id/index.php/generasiemas/article/download/2258/2746/16598>, diakses pada 7 November 2024 pukul 21.30 WIB)

Dilihat dari observasi awal, peneliti menemukan permasalahan yang berkaitan dengan peserta didik serta guru di lingkungan sekolah, sikap sosial yang dimiliki dan diterapkan oleh peserta didik masih sedikit. Sikap sosial sudah sering diajarkan oleh guru baik secara sadar ataupun tidak sadar bahkan diterapkan pada keseharian peserta didik, namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal. Sikap peserta didik terhadap gurunya masih kurang responsif ketika pembelajaran dan kurang menghormati ketika guru sedang menjelaskan materi di depan kelas, hal tersebut terjadi karena rasa peduli sosial dalam diri peserta didik masih minim jika tidak ada perintah ataupun dorongan. Hal tersebut juga terjadi pada teman sebayanya, rasa empati yang dimiliki masih sedikit ketika melihat temannya yang sedang mengalami kesulitan baik pada saat jam pembelajaran ataupun diluar jam pelajaran, seperti tidak memahami materi pembelajaran, tidak membawa alat tulis Ketika pembelajaran, gotong royong membersihkan kelas, membantu temannya yang sedang sakit dan kegiatan lain yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Kurangnya keaktifan di dalam kelas, atau sering izin ke luar kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Kurangnya motivasi ini tidak hanya dialami oleh satu atau dua kelas, namun sebagian siswa banyak yang terlambat berangkat ke sekolah atau catatan presensi absen pada piket depan yang banyak dalam beberapa pertemuan secara berturut-turut.

Disamping itu peneliti melihat guru masih kesulitan untuk beradaptasi dari kurikulum 2013 menuju kurikulum Merdeka. Selain itu penggunaan teknologi sebagai penunjang penerapan kurikulum Merdeka juga mengalami kendala dikarenakan ada beberapa guru yang kesulitan untuk menggunakan perangkat berbasis teknologi tersebut, sehingga penerapannya masih belum maksimal. Hal ini juga diiringi dengan bahan ajar serta fasilitas penunjang yang kurang memadai. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti Dampak Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran IPS Pada Perilaku Sosial Siswa di SMPN 1 Plered.

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Dari latar belakang permasalahan yang ditemukan, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi diantaranya.

1. Masih ditemukannya perilaku siswa yang kurang responsif ketika pembelajaran.
2. Kurangnya rasa empati terhadap sesama siswa.
3. Kurang menghormati guru saat pembelajaran di kelas.
4. Minimnya pemahaman guru terkait penerapan Kurikulum Merdeka Belajar.
5. Kurangnya penggunaan teknologi untuk penerapan kurikulum Merdeka Belajar oleh Sebagian guru.
6. Kurangnya bahan ajar serta sarana prasarana yang belum memadai untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka belajar.

## **C. Fokus Masalah**

Penulis akan memfokuskan permasalahan yang ditemui untuk menghindari kesimpangsiuran dalam bahasan ini, yaitu:

1. Implementasi kurikulum merdeka dalam pelajaran IPS
2. Perilaku sosial siswa.
3. Penelitian ini bertempat di Kelas VIII B.

## **D. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah.

1. Bagaimana penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPS?
2. Bagaimana sikap sosial siswa di SMP Negeri 1 Plered?
3. Bagaimana dampak penerapan Kurikulum Merdeka terhadap perilaku sosial siswa?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang ditemukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Mengetahui penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPS.
2. Mengetahui sikap sosial siswa di SMP Negeri 1 Plered.
3. Mengetahui dampak penerapan Kurikulum Merdeka terhadap perilaku sosial siswa.

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah wawasan serta kebermanfaatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana implementasi Kurikulum Merdeka.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Siswa

Menambah pengetahuan bagi siswa mengenai penerapan Kurikulum Merdeka Belajar dalam proses belajar mengajar sehingga bisa memaksimalkan proses pembelajaran.

###### b. Guru

Mendorong kepada tenaga pendidik untuk bisa menyesuaikan diri dan terus berkembang ditengah penerapan kurikulum yang baru agar bisa lebih maksimal dalam mendidik peserta didik.

###### c. Sekolah

Menambah khasanah serta evaluasi dari implementasi Kurikulum Merdeka yang diterapkan di SMP Negeri 1 Plered.



d. Lembaga

Memberi manfaat dan bahan kajian penulis dalam karya tulis, maupun artikel dan dapat memberikan sebuah pemahaman baru mengenai implementasi Kurikulum Merdeka.

